

Newsletter Pusdatin



Daftar Isi

- Monitoring Dan Verifikasi Hasil Pemetaan Lahan PAT Berbasis Geospasial, Halaman 1
- Pusdatin Berpartisipasi Dalam Pelatihan "Pengenalan Terhadap Social Accounting Matrix (SAM) dan Computable General Equilibrium (CGE)", Halaman 3
- Pusdatin Pantau PAT di 3 Kabupaten Jawa Tengah, Halaman 4
- Rekonsiliasi dan Evaluasi Kegiatan Statistik Harga 2024 Sebagai Upaya Perbaikan Data Harga Komoditas Pertanian, Halaman 6
- Deru Tantangan Akurasi Data Di Pemerintahan Baru: " Target Swasembada Pangan & Kesiapan Dukungan Data Pertanian, Halaman 8
- Menggugah Pertanian Modern Dengan Brigade Pangan: Solusi Untuk Swasembada Beras, Halaman 10

Mohon Kesediannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



bit.ly/surveipusdatin

Monitoring dan Verifikasi Hasil Pemetaan Lahan PAT Berbasis Geospasial

Berdasarkan arahan Bapak Menteri Pertanian, perlu dilakukan pelaporan hasil kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT). Pelaporan tersebut tidak hanya dalam bentuk data tabular, tetapi juga dalam bentuk data geospasial berupa titik koordinat dan/atau poligon luas areal pertanaman padi hasil kegiatan PAT. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data hasil kegiatan PAT, serta sebagai bukti dukung administrasi kegiatan dan sekaligus sebagai bahan usulan penyempurnaan Kerangka Sampel Area padi (KSA) BPS. Dengan adanya titik koordinat dan/atau poligon tersebut diharapkan hasil kegiatan PAT dapat diakomodir dalam perhitungan luas panen dan produksi padi KSA BPS.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297/KPTS/OT.050/M/07/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050/M/06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi



Tim Pusdatin memverifikasi hasil PAT berbasis geospasial di Kabupaten Bandung

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

**Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian**

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Dr. Nugroho Setyabudhi, S.kom, MM

Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si

Roydatul Zikria, S.Si, MSE

Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE

Iswadi

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE

Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Cahyani Wartianingsih, S.Kom

Hotlanis Mangatur S, S.Kom

Didik Pratama Saputra, S.Kom

Priatna Sari

Nur Hikmah, S.Stat

Rahma Andany, S.Kom

Marwati

Agung Mahendra, S.Kom

M. Eko Darwanto, ST

Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 78842029
e-mail : newsletter@pertanian.go.id

Darurat Pangan, dimana Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) ditunjuk sebagai



Verifikasi lapang: Kapusdatin didampingi KaBBPP Lembang dan Kadis Kabupaten Bandung

Penanggung Jawab sarana terkait sistem informasi. Pusdatin melakukan monitoring terkait: 1) Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan tumpang sisisip padi gogo; dan 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan tumpang sisisip padi gogo setiap hari kepada Menteri Pertanian dengan menyajikan rekapitulasi informasi harian di setiap provinsi mengenai target dan realisasi dari optimasi lahan rawa, pompanisasi dan tumpang sisisip padi gogo yang diambil dari sistem aplikasi laporanutama.pertanian.go.id. Oleh karena itu, Pusdatin memonitor dan verifikasi lahan pertanaman padi Kegiatan PAT berbasis geospasial yang dilakukan secara serempak di beberapa wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Pelaksanaan mulai tanggal 23 September 2024 dan masih berlangsung di bulan Oktober.

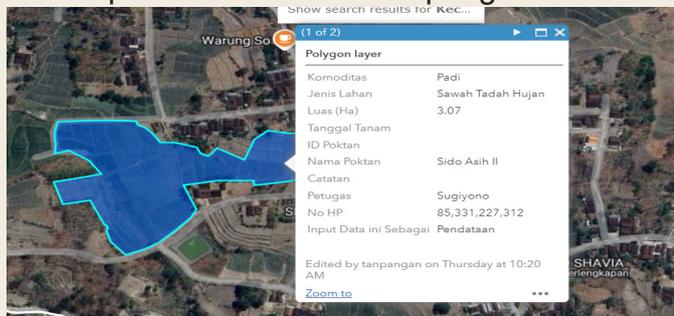
Tujuan penghimpunan poligon yang diinisiasi oleh Pusdatin adalah: 1) Akan digunakan sebagai bukti peningkatan pertanaman padi pada KSA – BPS; 2) Sebagai bukti administratif telah dilaksanakannya program PAT; 3) Sebagai bukti apabila ada pemeriksaan Inspektorat dan BPK; 4) Untuk mendukung kebijakan satu peta tentang penyediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan tanaman pangan, termasuk lahan pertanaman padi. Beberapa langkah untuk mempercepat penghimpunan poligon program PAT, Pusdatin melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pusdatin telah menyampaikan berbagai tahapan untuk penghimpunan poligon baik secara *online* maupun *offline*, dengan metode traking maupun digitasi *on screen*; 2) Para Koordinator Penyuluh (Korluh) sudah mempunyai kemampuan dalam menggunakan

software ArcGIS Field Map maupun WebGIS. Pusdatin sudah memberikan *username* dan *password* guna mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut; 3) Para Korluh akan segera menindak lanjuti pembuatan poligon setelah menerima data titik koordinat dan luasannya dari Bagian Produksi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Guna melakukan koordinasi dengan seluruh koordinator penyuluh untuk kelancaran kegiatan penghimpunan poligon program PAT ini maka telah dibentuk WhatsApp Grup. Monitoring pencapaian penghimpunan poligon dilakukan setiap hari. Tindak lanjut Pusdatin terkait poligon yang telah dibuat mencakup monitoring poligon dengan memeriksa kelengkapan tabel atribut, terutama pencantuman tanggal tanam (dengan batas waktu Oktober 2023 hingga Oktober 2024), serta pengolahan data PAT. Data luasan yang sudah di poligon sampai dengan tanggal 14 Oktober sudah mencapai 978.333,98 hektare.

Beberapa hasil verifikasi lapang untuk PAT



Poligon hasil digitasi untuk lokasi PAT Padi gogo Kecamatan Ngasem, Kab. Bojonegoro



Pendampingan terkait pembuatan poligon bertempat di Gedung Serba Guna kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

Penulis: Suyati

Pusdatin Berpartisipasi dalam Pelatihan “Pengenalan terhadap Social Accounting Matrix (SAM) dan Computable General Equilibrium (CGE)”

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) berkesempatan mengirimkan perwakilannya dalam pelatihan yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB). Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 5 sampai 7 Oktober 2024 di Hotel Swiss Bellin Kota Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari berbagai instansi yang dianggap berkepentingan untuk mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Diantara instansi ini adalah Bappenas, BRIN, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dari berbagai daerah seperti Lampung, Malang, Makasar dan Solo.

Pada pembukaan pelatihan, Profesor Erizal Jamal selaku Ketua menyampaikan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan dalam menggunakan *Social Accounting Matrix* (SAM) dan *Computable General Equilibrium* (CGE). “Sebagai alat untuk merancang kebijakan dan melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran, penggunaan SAM dan CGE dapat mendukung transformasi sistem pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang,” ujar Erizal.

Indonesia adalah negara dengan populasi besar dan sektor pertaniannya berperan sangat penting. Untuk itu tantangan yang dihadapi adalah memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan pangan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang tepat dan perencanaan yang terarah menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam. Indonesia saat ini berupaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*), sebuah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi melambat setelah mencapai tingkat pendapatan menengah. Salah satu strategi untuk keluar dari jebakan dengan

meningkatkan produktivitas sektor-sektor utama, terutama sektor pertanian, yang tidak hanya berperan penting dalam menyediakan pangan tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, diperlukan perencanaan kebijakan yang berbasis data, komprehensif, dan didukung oleh alat analisis yang andal.

Peneliti Senior di *International Food Policy Research Institute* (IFPRI), Angga Pradesha sebagai narasumber pelatihan ini mengatakan, "Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi dan memproyeksikan dampak kebijakan di masa depan adalah melalui penggunaan model SAM dan CGE". Lebih jauh Angga menjelaskan bahwa SAM memberikan gambaran lengkap tentang hubungan antar sektor dalam perekonomian, sedangkan CGE mampu memprediksi dampak kebijakan atau kejutan ekonomi terhadap berbagai variabel makroekonomi seperti harga, produksi, konsumsi, hingga kesejahteraan masyarakat.



Pelaksanaan pelatihan pengenalan terhadap SAM dan CGE

Pemahaman mengenai SAM dan CGE menjadi semakin penting dalam mendukung formulasi kebijakan yang tidak hanya mampu merespons kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan dan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Pelatihan "Introduction to Social Accounting Matrix (SAM) and Computable General Equilibrium (CGE)

Model" ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, IFPRI, dan *Bioversity International*. Materi pelatihan dilengkapi dengan praktek sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang dasar-dasar SAM dan CGE serta aplikasinya dalam analisis kebijakan ekonomi pertanian. Peserta diharapkan dapat mengembangkan ketrampilannya dalam menggunakan alat analisis SAM dan CGE yang dibangun IFPRI untuk memproyeksikan dampak kebijakan terhadap sektor pangan, lahan, dan air di Indonesia. Pada akhirnya setelah pelatihan ini peserta diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data yang komprehensif, guna memperkuat ketahanan pangan nasional.



Tim Pusdatin bersama para peserta telah menyelesaikan pelatihan SAM dan CGE

Penulis : Wieta B. Komalasari

Pusdatin Pantau PAT di 3 Kabupaten di Jawa Tengah

Tim Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) dipimpin Dhanang Susatyo melaksanakan pendampingan sekaligus melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk pembuatan poligon sawah di lokasi Perluasan Areal Tanam (PAT) di 3 wilayah Kabupaten, yakni Magelang, Klaten dan Boyolali. Bimtek ini bertujuan melatih para Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dalam pembuatan poligon sawah melalui aplikasi geoportal pertanian.go.id.

Bimtek ini dilaksanakan dari tanggal 26 – 28 September 2024. Berdasarkan data yang diperoleh realisasi PAT untuk wilayah Kabupaten Magelang adalah

1.899 hektare (ha). Hal itu diketahui setelah tim Pusdatin langsung melakukan verifikasi dan validasi data luas areal sawah di lokasi PAT. “Verifikasi dan validasi ini perlu dilakukan untuk melihat apakah data pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan data di Pusdatin,” kata Dhanang dalam bimtek di kantor dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Kamis (26/09/2024).



Verifikasi data PAT di kantor Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Magelang

Kegiatan bimtek ini diikuti oleh 10 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Dari verifikasi di Dinas Pertanian, tim Pusdatin bersama PPL turun langsung melihat perbedaan data luasan sawah di lokasi PAT. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembuatan poligon sawah di lokasi PAT dengan menggunakan perangkat laptop.

Hanya saja ketika pembuatan poligon sawah dilakukan, terdapat kendala yang dihadapi oleh para penyuluh pertanian yakni masalah jaringan internet yang tidak stabil dan juga kendala pada server Pusdatin. Hasil dari pembuatan poligon di Kabupaten Magelang adalah sebesar 1.314,9 ha, yang artinya bahwa wilayah Kabupaten Magelang masih kurang 584,1 ha di lokasi PAT. Dari Magelang, tim Pusdatin bergerak menuju Kabupaten Klaten untuk melakukan pendampingan sekaligus bimtek terkait pembuatan polygon sawah di lokasi PAT. Untuk wilayah Kabupaten Klaten, target PAT adalah 1.135 ha.



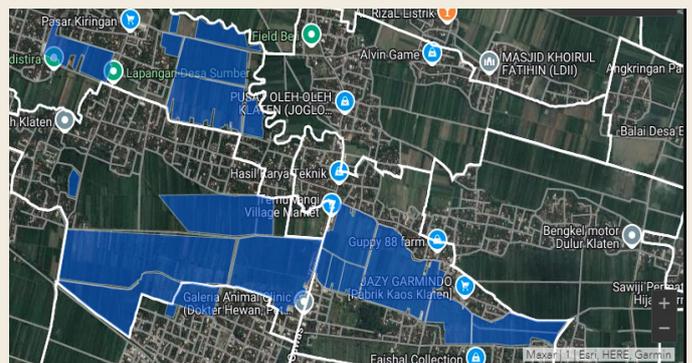
Pemetaan lahan PAT di Kabupaten Boyolali



Pemetaan lahan PAT di Kabupaten Klaten

Pelaksanaan bimtek di Kabupaten Klaten ini dihadiri oleh sekitar 70 orang petugas PPL dan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma). Adapun untuk target PAT Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 163.156 ha. Namun yang baru terealisasi adalah 7.002 ha, atau sekitar 4,41% dari total target. Mengingat target PAT yang tinggi, Pusdatin mengajak para pihak terkait untuk berkerjasama mendukung pencapaian PAT. Seluruh peserta bimbingan teknis sangat antusias terhadap kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembuatan poligon.

Diah, PPL dari Kecamatan Trucuk misalnya, mempertanyakan bagaimana tahapan penyelesaian poligon, termasuk cara memastikan luas areal sawah (poligon) yang sudah dibuat. Sementara salah satu mahasiswa Polbangtan mempertanyakan bagaimana cara merubah tampilan warna pada areal poligon yang sudah dibuat. Atas pertanyaan tersebut, tim Pusdatin langsung melakukan demo pembuatan poligon untuk wilayah Kecamatan Trucuk. Dari praktek tersebut diketahui luas PAT Kecamatan Trucuk seluas 14,6 ha. Sedangkan hasil dari pembuatan poligon di Kabupaten Klaten adalah sebesar 1.283,3 ha, yang artinya, terjadi surplus PAT 148,3 ha.



Contoh luasan sawah di lokasi PAT pada kecamatan Gantiwarno (warna biru)

Penulis : Dhanang S



Rekonsiliasi dan Evaluasi Kegiatan Statistik Harga 2024 Sebagai Upaya Perbaikan Data Harga Komoditas Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) sebagai Walidata di Kementerian Pertanian pada tanggal 9-12 Oktober 2024 telah menghadiri undangan dari Direktorat Statistik Harga BPS yang merupakan salah satu produsen data harga yang dikelola Pusdatin. Tema acara tersebut adalah "Rekonsiliasi dan Evaluasi Kegiatan Statistik Harga 2024" yang bertempat di Hotel Papandayan Bandung Jawa Barat. Acara dihadiri oleh seluruh petugas pengelola data harga BPS Pusat, BPS Provinsi di 38 Provinsi serta Perwakilan dari Pusdatin Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa independensi BPS adalah harga mati, BPS

tidak sebagai anggota tim pengendali inflasi pusat maupun daerah, namun kehadiran BPS sebagai narasumber dan penyedia data. Selain itu setiap pegawai BPS harus mampu berperan sebagai agen statistik yang mampu menjelaskan peran BPS, tidak hanya menghasilkan indikator tetapi juga harus mampu meningkatkan literasi kepada pengguna data. Dalam kaitan indikator dan literasi pengguna data terkait data harga, Pusdatin Kementerian Pertanian sebagai salah satu pengguna data harga dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang bersumber dari BPS. Data terkait harga yang dikelola di Pusdatin diantaranya harga produsen gabah dan beras, harga produsen dan konsumen di pedesaan komoditas pertanian serta (NTP).

Setelah acara pembukaan, pada acara rekonsiliasi dan evaluasi statistik harga ini dilanjutkan dengan pembagian peserta dalam 3 kelas yaitu (A) Tim Statistik Harga Perdagangan Internasional (B) Tim Statistik Harga Konsumen (C) Tim Statistik Harga Produsen Gabah/Beras, Harga Produsen dan Konsumen Perdesaan serta NTP. Pusdatin Kementan dalam hal ini masuk di kelas C, sesuai dengan data yang dikelola selama ini di Pusdatin. Pada masing-masing kelas telah disampaikan beberapa materi untuk menyamakan persepsi dan peningkatan pengetahuan petugas terkait metodologi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data harga yang disampaikan oleh BPS Pusat. Evaluasi dari BPS Pusat terhadap pelaporan data yang masuk ke BPS Pusat diantaranya (1) terdapat beberapa petugas pencacah yang masih salah dalam menulis satuan seharusnya ton ditulis kg, (2) pengawas kurang teliti terkait keterbandingan antar isian misalnya gabah (GKG) yang digiling 1000 ton, sementara beras hasil gilingan hanya 7 ton dan yang dijual 4 ton, seharusnya tidak langsung *diapprove* oleh pengawas perlu konfirmasi dulu ke petugas pencacah (3) perlu dicermati koherensi antara gabah yang dibeli dan harga beras yang dijual (4) penulisan alasan perubahan harga kurang sesuai, misalnya terjadi deflasi tetapi penulisan alasan inflasi, atau alasan yang ditulis seharusnya fenomena bukan jumlah observasi atau alasan yang tidak relevan.

Yang tidak kalah menarik dalam kegiatan ini adalah pada saat perwakilan dari beberapa provinsi menyampaikan paparan terkait

evaluasi data harga di masing-masing provinsi, diantaranya menyampaikan evaluasi perubahan harga antar bulan masing-masing komoditas, apakah secara *trend* searah atau tidak dengan IHP (Indeks Harga Produsen) diagram timbang provinsi serta memberikan penjelasan atau fenomena dari perubahan harga yang didapat tersebut, misalnya untuk beberapa komoditas pangan terjadi peningkatan harga apakah karena bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti puasa, hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau karena rendahnya *supply* karena tidak ada panen atau terhambatnya distribusi karena cuaca dan lain sebagainya. Penjelasan fenomena memperhatikan faktor *supply* dan *demand* sebagai faktor pembentuk harga. Selain itu informasi lain yang terkait seperti harga Tandan Buah Segar (TBS) di Sumatera Utara dari pengecekan fenomena di lapangan, harga TBS cenderung ditentukan oleh Pemda setempat berdasarkan harga CPO dunia. Melalui pertemuan dan diskusi seperti ini akan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam melakukan pengelolaan data harga yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas data harga. Terkait data nilai tukar petani yang selama ini dianggap salah satu indikator kesejahteraan petani, sebenarnya bukan indikator yang tepat untuk mengukur kesejahteraan petani, untuk itu BPS mengusulkan dibentuknya Indeks Kesejahteraan Petani (IKP). Hasil IKP diuji dengan beberapa tes seperti uji *redudensi*, uji *robustness* dan uji *sensitivity* untuk memasukan bahwa hasil IKP *robust*. Hingga saat ini hasil IKP belum dirilis oleh BPS dan merupakan indikator baru masih perlu dilakukan kajian mendalam serta periode tahunan. Sementara NTP dan NTUP telah masuk dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan periode data bulanan sehingga masih diperlukan oleh K/L terkait seperti Bappenas, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi lainnya.

Dalam penutupan kegiatan ini telah disampaikan beberapa hasil kesepakatan bersama sebagai upaya perbaikan data harga kedepan diantaranya: (1) rencana akan dilakukan pertemuan rutin melalui daring setiap triwulan antar BPS Pusat dan BPS Provinsi agar pusat dan daerah mempunyai pemahaman yang sama untuk semua kegiatan yang dilakukan, terutama

untuk daerah yang seringkali terjadi pergantian penanggungjawab kegiatan. Pertemuan ini menunggu kesiapan *web entry* untuk bisa menyediakan data yang dibutuhkan, (2) diskusi fenomena perkembangan harga di berbagai level harga untuk beberapa provinsi sebagai ajang pertukaran informasi dan berbagai pengalaman dalam melakukan analisis perubahan harga yang dapat digunakan sebagai data pendukung pada saat rilis, (3) akan dilakukan evaluasi pencacahan, komoditas dengan jumlah terlalu banyak/terlalu sedikit (*realokasi*), (4) penyusunan diagram timbang indeks harga produsen direncanakan untuk seluruh provinsi di Indonesia dan dilaksanakan secara bertahap.



Rekonsiliasi Statistik Harga BPS

Sebagai informasi bahwa pemantauan harga produsen gabah diperlukan sebagai peringatan dini dalam rangka menciptakan stabilitas harga di pasaran. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya permainan harga gabah/beras oleh para tengkulak. Selain itu rendahnya kualitas hasil panen dan terjadinya kasus harga gabah yang berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memiliki dampak cukup signifikan terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu, evaluasi harga produsen gabah perlu terus dilakukan untuk melihat seberapa jauh kesenjangan harga yang terjadi dan seberapa besar variasi sebaran harga. Pemerintah menetapkan kebijakan berupa HPP untuk mengendalikan harga di pasar dan melindungi harga produsen gabah di tingkat petani. Berdasarkan Peraturan Bappenas No 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bappenas No. 6 tahun 2023 per 3 Juni 2024 tentang harga pembelian pemerintah dan refraksi harga beras dan gabah, ditetapkan HPP gabah kering panen (GKP) per kg sebesar Rp 6.000 (di petani) dan Rp 6.100 (di penggilingan), harga gabah kering giling (GKG) per kg sebesar Rp 7.300 (di penggilingan) dan Rp 7.400 (di gudang Perum Bulog), sementara harga beras di gudang perum Bulog sebesar

Rp 11.000 per kg. Perpanjangan relaksasi harga eceran tertinggi (HET), merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional.



Pemukulan gong pada pembukaan Rekonsiliasi dan Evaluasi Kegiatan Statistik Harga 2024 oleh Direktur Statistik Harga BPS

Penulis : Sabarella

Deru Tantangan Akurasi Data di Pemerintahan Baru: “Target Swasembada Pangan & Kesiapan Dukungan Data Pertanian”

Setelah pelantikan, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program pencapaian swasembada pangan dalam dua tahun pertama masa jabatan. Swasembada pangan adalah upaya suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan populasinya tanpa harus bergantung pada impor. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut ketahanan pangan nasional tetapi juga melibatkan sejumlah lembaga pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian. Dengan target sedemikian, peran lembaga pengelolaan data pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) dan lembaga riset lainnya akan semakin penting, dan akan ada beberapa perubahan signifikan dalam kinerja fungsi pengumpulan, analisis, dan penyebaran data. Kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai swasembada pangan dalam dua tahun ke depan akan menjadi tantangan besar. Agar tercapai, pemerintah perlu meningkatkan output sektor pertanian secara signifikan dengan segera

mencari solusi tepat guna terhadap kendala yang telah ada sejak lama, misalnya konversi lahan pertanian yang produktif, ketergantungan pada impor bahan baku tertentu (termasuk pupuk), perubahan iklim, dan keterbatasan akses petani terhadap teknologi modern.

Untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat, akan memerlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang proaktif, antara lain terhadap: subsidi pertanian, kemudahan sarana maupun prasarana serta jaminan bagi petani, serta investasi pada teknologi dan infrastruktur. Strategi ini tentu tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan data akurat dan analisis yang tepat. Data yang terkumpul menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, di antaranya pemetaan wilayah potensial, estimasi produksi, dan distribusi pangan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan antar daerah. Guna memenuhi hal tersebut diatas, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis data sektor pertanian dipastikan akan semakin banyak tuntutan dalam mencapai ketepatan dan keakuratan data. Dalam waktu dekat, lembaga dan organisasi pemerintah akan menghadapi beberapa dampak sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kebutuhan Data yang Akurat dan Terkini

Agar pemerintah bisa memantau dan mengoptimalkan hasil produksi pangan, data yang akurat dan *real-time* menjadi kebutuhan utama. BPS dan Pusdatin misalnya, perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi pemutakhiran data terkait luas lahan, hasil panen, kondisi cuaca, hingga harga komoditas di setiap wilayah. Untuk itu, teknologi seperti sensor IoT (*Internet of Things*) di lapangan, satelit pemantau lahan, serta aplikasi pencatatan digital bagi petani dapat diintegrasikan agar data yang masuk lebih cepat dan andal. Peningkatan akurasi ini tentunya memerlukan kolaborasi lintas sektor, pemangku kepentingan lainnya. Adapun informasi yang dapat untuk di digitalisasi secara Perkembangan teknologi yang cepat dan andal. Peningkatan akurasi ini tentunya memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian hingga perusahaan teknologi.

2. Pengembangan Terkait Kompetensi Dalam Big Data dan Analisis

Identifikasi permasalahan dan analisis prediktif merupakan dua langkah penting dalam pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Organisasi yang membidangi data pertanian “diramalkan” akan perlu merekrut pegawai tambahan yang fokus pada ilmu data, terutama keahlian dalam mengelola *big data* dalam perencanaan kebijakan berbasis data-data pertanian yang strategis. Pendekatan orientasi data dengan memanfaatkan *big data*, dengan fokus pada pemahaman terkait pola panen, musim, dan risiko dengan cara yang lebih rinci sehingga kebijakan yang diperlukan dapat diterapkan secara rasional.



3. Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Akademisi

Untuk mencapai target swasembada dalam waktu yang relatif singkat, diperlukan masukan data yang akurat. Pusdatin sebagai *center of excellent data* di Kementerian Pertanian dapat bekerjasama antara pemerintah, lembaga riset, dan akademisi menjadi sangat penting. Pusdatin dapat bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan model teknologi pemetaan pertanian berbasis penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan informasi peningkatan produksi. Penelitian tentang adaptasi tanaman terhadap perubahan iklim, hidroponik, serta strategi pemupukan yang berkelanjutan dapat dijadikan dasar untuk formulasi kebijakan pertanian yang berorientasi pada ilmu pengetahuan.

4. Perubahan Sistem Pelaporan dan Distribusi Data

Sudah semestinya diimbangi dengan sistem pelaporan yang memadai dan praktis, terlebih untuk mendukung target ambisius pencapaian swasembada pangan. Pusdatin perlu untuk

segera meningkatkan sistem pelaporan dan penyebaran informasi dengan memanfaatkan sistem digital agar dapat dimanfaatkan secara luas untuk pemerintah daerah, petani, *dareal-time*, yaitu terkait luas area yang dipanen, hasil per hektare, cadangan pangan, dan harga pasar.

5. Integrasi dengan Sistem Nasional dan Internasional

Untuk memastikan kesuksesan dalam ketahanan pangan mandiri, Pusdatin juga harus memastikan agar dapat terhubung dengan sistem pangan global. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghindari kekurangan di masa depan karena komoditas tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ketika integrasi dengan data-data yang diperlukan secara internasional, diharapkan kebijakan tentang impor dapat lebih cepat dan akurat sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan dalam negeri.

Disadari bahwa pengumpulan data yang akurat dan berbasis teknologi dapat mendukung swasembada pangan, namun Pusdatin menghadapi beberapa tantangan, diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan SDM, dan resistensi terhadap perubahan digital di kalangan petani yang telah lama menggunakan cara tradisional. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam menerapkan teknologi canggih dan memperbarui sistem yang ada.

Target swasembada pangan yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah langkah ambisius yang membutuhkan dukungan data yang akurat dan andal. Keberhasilan mencapai swasembada pangan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada ketepatan data dan kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data yang relevan bagi pengambil keputusan. Dengan dukungan teknologi dan kerja sama lintas sektor, target ini bukan hanya mungkin tercapai, tetapi juga dapat menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih kokoh dan kuat di Indonesia. Namun, tanpa peningkatan kualitas dan aksesibilitas data yang berkesinambungan, program pemerintah terkait swasembada pangan tidak akan terealisasi.

Penulis : Apriadi Setiawan.



Menggugah Pertanian Modern Dengan Brigade Pangan "Solusi Untuk Swasembada Beras"

Ketahanan pangan adalah isu yang sangat krusial bagi Indonesia. Sebagai negara agraris yang memiliki jumlah penduduk besar, kebutuhan akan beras terus meningkat setiap tahunnya. Namun, berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga minat generasi muda yang rendah di sektor pertanian mengancam kemampuan negara untuk mencapai swasembada pangan. Menjawab tantangan ini, Kementerian Pertanian meluncurkan program inovatif bernama Brigade Pangan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi beras dengan pendekatan modern yang berbasis teknologi dan manajemen terintegrasi, serta memberdayakan generasi muda sebagai ujung tombaknya.

Apa Itu Brigade Pangan?

Brigade Pangan adalah unit pertanian modern yang dirancang untuk mengelola lahan sawah dalam skala besar, yaitu sekitar 200 hektar per unit. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi pertanian canggih dan manajemen profesional. Program ini berangkat dari kebutuhan untuk memodernisasi sektor pertanian Indonesia yang selama ini didominasi oleh metode konvensional yang cenderung tidak efisien. Dengan skala usaha yang besar dan dukungan infrastruktur yang memadai, Brigade Pangan diharapkan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan dan mempercepat tercapainya swasembada beras.

Salah satu aspek kunci dari Brigade Pangan adalah integrasi generasi muda ke dalam dunia pertanian. Generasi milenial dan lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan—mulai dari SMK hingga perguruan tinggi—diberdayakan untuk bergabung sebagai pengelola unit usaha tani ini. Ini bertujuan mengatasi masalah regenerasi petani, mengingat banyak petani di Indonesia yang sudah berusia lanjut. Dengan kehadiran anak muda yang adaptif terhadap teknologi, pertanian dapat bertransformasi menjadi sektor yang lebih modern dan menarik.

Brigade Pangan juga dilengkapi dengan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah, termasuk subsidi sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk, dan alsintan. Selain itu, pemerintah juga menjamin adanya pasar untuk hasil panen melalui kemitraan dengan perusahaan *off-taker* dan BUMN. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan produktivitas, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani yang terlibat.

Proses Pembentukan Brigade Pangan

Proses pembentukan Brigade Pangan dimulai dari inisiatif petani yang ingin bergabung dalam program ini. Petani harus mengajukan pembentukan Brigade Pangan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. Setelah pengajuan diterima, dilakukan musyawarah bersama dengan kepala desa, Babinsa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menentukan kelayakan kelompok tani yang akan dibentuk. Hal ini memastikan bahwa setiap Brigade Pangan memiliki legalitas yang jelas dan terstruktur. Setelah musyawarah, langkah berikutnya

adalah penginputan data Brigade Pangan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Simluhtan berfungsi sebagai basis data nasional yang mengelola informasi seputar petani dan program pertanian. Dengan masuknya data ke Simluhtan, Brigade Pangan akan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan bantuan dari pemerintah, termasuk alsintan yang diperlukan untuk pengolahan lahan dan panen.

Pangan juga menggunakan mesin modern untuk pascapanen. Combine harvester adalah salah satu contohnya, yang mampu memanen, merontokkan, dan membersihkan padi dalam satu proses. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi kehilangan hasil panen yang sering terjadi dalam proses manual. Pompa air aksial juga digunakan untuk mengatur irigasi, memastikan bahwa kebutuhan air di lahan pertanian terpenuhi secara optimal.



Dukungan sarana produksi lainnya mencakup penggunaan benih unggul, pupuk NPK, pupuk urea, pestisida, dan herbisida dalam skala besar. Benih unggul yang digunakan memiliki daya tumbuh tinggi dan tahan terhadap hama serta penyakit, sehingga produktivitas meningkat. Pupuk dolomit, misalnya, digunakan untuk menetralkan pH tanah yang asam, yang sangat penting dalam menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Brigade Pangan juga memiliki fleksibilitas dalam menentukan pola kemitraan yang akan diterapkan. Salah satu pola yang populer adalah bagi hasil dengan rasio 70% untuk brigade dan 30% untuk pemilik lahan. Dalam pola ini, Brigade Pangan bertanggung jawab atas manajemen dan operasional lahan, sementara pemilik lahan menyediakan aset berupa tanah. Kesepakatan ini berlangsung selama minimal lima tahun untuk memberikan stabilitas dalam pengelolaan lahan.

Teknologi dan Sarana Produksi

Brigade Pangan sangat mengandalkan teknologi modern dalam operasionalnya. Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi elemen kunci yang membedakan program ini dengan pertanian tradisional. Alat-alat seperti traktor roda empat (TR 4), rotavator, dan drone seeder memungkinkan proses pengolahan tanah dan penanaman benih dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Drone seeder, misalnya, dapat menebar benih secara merata di lahan yang luas dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode manual. Selain alsintan untuk prapanen, Brigade

Pola Kemitraan yang Menguntungkan

Kemitraan adalah fondasi utama dalam keberhasilan Brigade Pangan. Dalam pola ini, petani sebagai anggota Brigade Pangan bermitra dengan pemilik lahan, pemerintah, dan perusahaan off-taker. Rasio bagi hasil 70:30 memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, di mana petani mendapatkan porsi keuntungan lebih besar karena mereka bertanggung jawab atas manajemen dan produksi. Ini juga menjadi insentif bagi pemilik lahan untuk terus berinvestasi dalam usaha tani. Selain kemitraan finansial, Brigade Pangan juga bermitra dengan pemerintah dalam hal pengadaan sarana produksi dan teknologi. Pemerintah menyediakan alat pertanian, benih, dan pupuk dengan subsidi atau melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini meringankan beban modal awal petani dan memungkinkan mereka untuk fokus pada peningkatan produktivitas. Keuntungan lainnya adalah jaminan pasar. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan off-taker dan BUMN untuk membeli hasil panen Brigade Pangan. Ini memberikan kestabilan

harga dan mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi pasar. Dengan adanya jaminan, petani dapat fokus pada produksi tanpa perlu khawatir tentang pemasaran hasil panen mereka.

Tantangan dan Harapan

Meskipun memiliki banyak potensi, program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang siap terlibat dalam pertanian modern. Generasi muda masih cenderung memandang pertanian sebagai sektor yang kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan kampanye yang intensif untuk mengubah persepsi ini dan menunjukkan bahwa pertanian modern adalah sektor yang menjanjikan. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan infrastruktur pendukung, seperti jalan akses, irigasi, dan fasilitas penyimpanan. Tanpa infrastruktur yang memadai, efisiensi yang diharapkan dari penggunaan teknologi modern tidak akan tercapai. Pemerintah perlu terus meningkatkan investasi dalam infrastruktur pertanian agar program ini berjalan optimal. Namun, dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, Brigade Pangan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif di sektor pertanian Indonesia. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi beras nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menginspirasi generasi muda untuk kembali ke sektor pertanian.

Brigade Pangan adalah bukti bahwa transformasi pertanian menuju era modern sangat mungkin terjadi. Dengan dukungan teknologi, kemitraan yang saling menguntungkan, dan partisipasi aktif generasi muda, program ini menawarkan solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Indonesia. Masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi milenial, dan Brigade Pangan adalah wadah bagi mereka untuk berkontribusi dalam membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Penulis : Nugroho S



Selamat Hari Sumpah Pemuda 2024! Mari kita teruskan semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun Pertanian Indonesia yang Mandiri. Salah satu langkah penting menuju kemandirian adalah dengan mewujudkan swasembada pangan.

Dengan mendukung pertanian Indonesia dan memperkuat produksi dalam negeri, kita bukan hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjaga masa depan Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Mari bersama-sama, jadikan Indonesia lebih kuat dengan semangat Sumpah Pemuda.

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian

bit.ly/surveipusdatin